
Komunikasi Politik dan Kepemimpinan Transformasional Perempuan dalam Parlemen

Saepudin^{1*}, Megandaru Widhi Kawuryan¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi

Jl. Wijaya II No. 62 Jakarta 12160 - Indonesia

*Email korespondensi: a.saepudinn1507@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.25008/jpi.v4i1.97>

Submitted: 02 Maret 2022 Revised: 20 April 2022 Published: 30 April 2022

Abstract

The participation of women in politics has reached the most significant development in this decade. More and more women are becoming leaders in parliaments in many countries, namely Asia Pacific, Africa, Europe, the United States. Puan Maharani was elected as chairman of the Indonesian House of Representatives and a woman who can be equated with female leaders in the World Parliament, and for the first time in Indonesia. The purpose of this study is to understand and describe the political communication of women's transformational leadership in parliament. The research paradigm is phenomenology with a qualitative approach. Data was collected through participant observation, and in-depth interviews with 9 members of the DPR RI who were used as informants who directly interacted with Puan Maharani, and could provide information about the political communication of Puan Maharani's transformational leadership in her activities leading the Chair of the DPR RI. The next step is to study the documentation literature, and search through the internet. Data reduction, display, and verification/conclusion are the stages of data analysis that the author uses in this study. The findings in this study, as a political communicator, the role of transformational leadership is influenced by the long journey of previous organizational experience. Selection of messages using a straightforward communication style. The communication media used are interpersonal communication and interactional group communication, either directly through face-to-face meetings with constituents. As well as utilizing the mass media, as well as social media to inform various policies related to parliament, and as parliamentary leader Puan Maharani has succeeded in establishing an open communication space.

Keywords: Political Communication; Media; Transformational Leadership; Parliament; Woman

Abstrak - Partisipasi perempuan dalam politik mencapai perkembangan yang signifikan dalam satu dekade ini. Semakin banyak perempuan menjadi pemimpin parlemen di Asia Pasifik, Afrika, Eropa, Amerika Serikat. Puan Maharani, Ketua DPR RI dapat disejajarkan dengan pemimpin wanita dalam parlemen dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan komunikasi politik kepemimpinan transformasional perempuan dalam parlemen. Paradigma penelitiannya, fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, dan wawancara mendalam terhadap sembilan anggota DPR RI sebagai informan yang berinteraksi dengan Puan Maharani, dan bisa memberikan informasi mengenai komunikasi politik kepemimpinan transformasional Puan Maharani. Langkah selanjutnya melakukan studi kepustakaan, dokumentasi, dan penelusuran melalui internet. Reduksi data, display, dan verifikasi/kesimpulan adalah tahapan analisis data yang digunakan dalam studi ini. Temuan penelitian ini adalah, sebagai komunikator politik, peran kepemimpinan transformasional Puan Maharani dipengaruhi oleh perjalanan panjang pengalaman berorganisasi sebelumnya. Media komunikasi yang digunakan adalah komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok yang sifatnya interaksional, baik secara langsung melalui pertemuan tatap muka dengan konstituen, serta memanfaatkan media massa, dan media sosial untuk menginformasikan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan parlemen. Sebagai pemimpin parlemen Puan Maharani telah berhasil membangun ruang komunikasi secara terbuka.

Kata Kunci: Komunikasi Politik; Media; Kepemimpinan Transformasional; Parlemen; Perempuan

Pendahuluan

Keterwakilan perempuan di parlemen merupakan salah satu kemajuan yang diharapkan dapat membawa perubahan kualitas legislasi berperspektif perempuan dan berkeadilan gender. Perubahan cara pandang dalam melihat dan menyelesaikan masalah politik dengan mengutamakan metode perdamaian dan anti kekerasan, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkontribusi pada kebutuhan perempuan sebagai bagian dari agenda nasional, dan menjadikan perempuan berdaya untuk terlibat dalam berbagai permasalahan yang selama ini belum terselesaikan, mendapat perhatian di Indonesia yang sensitif gender.

Landasan konstitusional yang bisa dijadikan dasar atas hak politik perempuan, di antaranya Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945: "Setiap orang berhak memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Selain itu, terdapat UU Parpol No 2/2008 dan UU Pemilu No 7/2017, yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan pada legislatif. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), menyebutkan sejumlah pasal yang memberikan kebebasan kepada perempuan untuk memilih pemimpin maupun menjadi pemimpin dan menyuarakan perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki.

Partisipasi perempuan dalam politik mencapai perkembangan yang signifikan dalam satu dekade ini (Tabel 1), menjadi pemimpin parlemen di Asia Pasifik, Afrika,

Eropa, Amerika Serikat. Jalalzai (2004) mengemukakan, jumlah perempuan yang menduduki jabatan eksekutif, sedikit tetapi bervariasi secara geografis. Pemimpin perempuan memiliki latar belakang pendidikan dan politik beragam. Batu loncatan penting untuk Asia dan Amerika Latin, telah menjadi ikatan keluarga perempuan dengan para pemimpin politik. Bahkan wanita-wanita ini lebih beragam dari yang diharapkan dalam hal latar belakang dan pengalaman politik.

Puan Maharani (PM) dilantik sebagai Ketua DPR RI, periode 2019-2024, sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Lima kursi pimpinan DPR menjadi milik lima partai peraih suara terbanyak. Kursi Ketua DPR jadi milik PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019, dan empat kursi wakil milik Golkar, Gerindra, dan PKB (Gambar 1).



Gambar 1. Pelantikan Puan Maharani bersama para wakilnya
Sumber: website PDI Perjuangan

Hal ini mendeskripsikan perempuan yang dapat disejajarkan dengan pemimpin wanita dalam parlemen dunia, dan pertama kali di Indonesia. Berikut adalah tabel yang menggambarkan posisi Indonesia nomor tiga untuk wilayah Asia dan Pasifik

Tabel 1. Pemimpin Wanita dalam Parlemen Dunia

No	Asia & Pasifik	Afrika	Eropa	Amerika Selatan	Amerika Utara
1	Bangladesh	Congo	Malta	Meksiko	Amerika Serikat
2	Bahrain	Zambia	Belanda	Venezuela	Belize
3	Indonesia	Malawi	Bulgaria	-	-

4	Laos	Madagaskar	Norwegia	-	-
5	Samoa	Mozambik	Polandia	-	-
6	Suriname	Rwanda	Moldova	-	-
7	-	Afrika Selatan	San Marino	-	-
8	-		Serbia	-	-
9	-	Togo	Spanyol	-	-
10	-		Turkmenistan	-	-
11			Andorra	-	-
12	-		Bosnia Hergezovin		

Sumber: (IPU Parlene, 2021)

Namun terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI menuai opini publik pro dan kontra di media sosial, seperti *Twitter* dan terlihat dalam *trending topic* se-Indonesia dengan jumlah cuitan melebihi angka sembilan ribu, sebagaimana besar mempertanyakan kompetensinya (Gunadha, 2019). Kompetensi telah menjadi isu sejak awal. Memiliki kompetensi untuk berkomunikasi dan memahami bagaimana melakukan komunikasi dengan benar adalah dua hal yang berbeda. Menurut Morreale et al. (2000) “manusia dilahirkan dengan kemampuan bersuara; tetapi tidak dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menentukan kompetensi komunikasi politik. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan tepat dipelajari dan, oleh karena itu, harus diajarkan”.

Komunikasi secara signifikan mempunyai kontribusi pada penyesuaian sosial individu dan partisipasi dalam hubungan interpersonal (Morreale et al., 2000). Pada saat yang sama, dalam bidang ilmu politik, misalnya, gaya kepemimpinan transformasi politik perempuan sangat penting, karena organisasi politik berada di lingkungan yang tidak bersahabat bagi politisi perempuan.

Dalam organisasi politik di mana pemimpin dipilih oleh rakyat dan oleh karena itu harus mempengaruhi pemilih dan membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya. Pemimpin politik adalah perwakilan utama partainya dan pendekatan komunikasi berdampak pada

partai, pemilih, dan pemimpin itu sendiri. Studi tentang pemimpin perempuan telah menyoroti kesenjangan dalam pemahaman tentang kepemimpinan dari perspektif yang berorientasi gender (Kruikemeier et al., 2013). Temuan penelitian yang dilakukan (Maela et al., 2018) mengeksplorasi bahwa kompetensi komunikasi perempuan dalam parlemen memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalin relasi dan eksistensi di media.

Sejumlah penelitian tentang adanya beberapa perbedaan antara legislator laki-laki dan perempuan dalam perilaku legislatif dan preferensi kebijakan. Keterlibatan perempuan dalam politik dan sebagai wakil rakyat berarti perempuan telah menjadi komunikator politik yang dipaksa memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik. Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi (termasuk fakta, opini, keyakinan), di mana pertukaran dan pencarian dilakukan dikeluarkan oleh peserta dalam konteks kegiatan politik yang dilembagakan. Komunikasi politik berfungsi untuk menghubungkan seluruh bagian sistem politik, sehingga berbagai aspirasi dan kepentingan politik dapat diubah menjadi suatu kebijakan.

Grebelsky-lichtman, (2021) menyatakan, komunikasi politisi perempuan, dapat meningkatkan manajemen kesan politik mereka, mempengaruhi persepsi kekuasaan dan pengaruh dalam hal konstruksi sosial gender, serta berkontribusi pada

kesuksesan politik mereka, namun, ada kekurangan studi yang mengidentifikasi dan memetakan komunikasi politik kepemimpinan transformasional gender politisi perempuan.

Sementara Sianipar & Hanita (2019) menyatakan perlunya peningkatan kepemimpinan transformasional perempuan di lembaga legislatif, dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif dalam pengambilan keputusan bagi masyarakat khususnya yang menyangkut kepentingan perempuan. Studi lain mengatakan bahwa perempuan dapat dilihat membawa perspektif, pengalaman, dan keahlian mereka sendiri ke politik dan lebih mungkin dari pada memperkenalkan undang-undang tentang pendidikan, kesehatan, perawatan anak, dan kerentanan terhadap perempuan. Ini akan menjadi terobosan yang menarik untuk diungkap secara ilmiah, mengingat perempuan mungkin memiliki strategi yang berbeda dengan laki-laki.

Dalam kaitannya dengan uraian di atas, Burns (1990) menjelaskan, kepemimpinan bukan hanya terdiri dari orang yang memimpin saja, akan tetapi juga melibatkan anggota (*followers*) dalam proses kepemimpinannya. Hal ini berdasarkan asumsi, pada kondisi masyarakat yang sudah sangat berdaya; batas kapasitas pribadi antara yang dipimpin dengan pemimpin sudah sangat tipis (artinya sudah sama-sama pintar). Masyarakat tidak lagi membutuhkan sosok pimpinan yang serba bisa dan instruksionis, melainkan pemimpin yang bisa menampung aspirasi bersama untuk bersama-sama diwujudkan dalam tindakan kelembagaan yang sistematis (Ruliana, 2016).

Terlepas dari permasalahan tersebut di atas, keterwakilan Puan Maharani sebagai perempuan yang memimpin parlemen merupakan salah satu kemajuan yang diharapkan membawa perubahan kualitas perundang-undangan yang berperspektif perempuan dan berkeadilan gender. Karena yang menjadi masalahnya adalah bagaimana komunikasi politik

kepemimpinan transformasional Puan Maharani sebagai Ketua Parlemen dengan semua hambatan dan faktor yang mendukung keterlibatan anggota perempuan dalam parlemen.

Hal lain yang menarik untuk dikaji karena Puan Maharani mewakili perempuan di Indonesia dalam memimpin parlemen. Bahkan lebih jauh dari itu, karena setengah total jumlah penduduk di Indonesia adalah perempuan, maka mengabaikan perempuan Indonesia dalam pembuatan keputusan politik sama artinya dengan meminggirkan mayoritas penduduk Indonesia dari proses politik (Zamroni, 2013).

Studi alternatif lain telah mengklaim bahwa perempuan dalam memimpin Parlemen lebih liberal, konservatif, pasif, moralistik, manusiawi, atau feminis dalam keyakinan ideologis mereka. Perbedaan gender dalam sikap ini dapat dikaitkan dengan pengalaman perempuan atau perbedaan bawaan, namun, ada kesepakatan tentang apakah ada perbedaan gender yang signifikan dalam seorang politisi, dan, jika demikian, apa sifatnya dalam meningkatkan citra Parlemen di mata publik (Norris & Lovenduski, 1989).

Puan Maharani sebagai pemimpin DPR RI harus mampu melakukan perubahan cara pandang dalam melihat dan menyelesaikan masalah politik dengan mengutamakan metode perdamaian dan anti kekerasan, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkontribusi pada kebutuhan perempuan sebagai bagian dari agenda nasional dan menjadikan perempuan berdaya untuk terlibat dalam berbagai masalah yang selama ini belum terselesaikan dan mendapat perhatian di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini secara khusus adalah, bagaimana komunikasi politik kepemimpinan transformasional perempuan dalam Parlemen? Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan komunikasi politik kepemimpinan

transformatif perempuan dalam parlemen.

Kerangka Teori

Konsep komunikasi politik mengacu pada seperangkat praktik dan disiplin profesional teoretis dan ilmiah. Sebagai praktik profesional, istilah "komunikasi politik" menunjukkan serangkaian proses komunikasi yang telah diberi label beragam seperti propaganda, pemasaran elektoral, pemasaran politik, kampanye politik, dan hubungan masyarakat politik.

Komunikasi politik telah berkembang menjadi bidang akademik penyelidikan, dengan landasan teoritis dan metode dari komunikasi, ilmu politik, sosiologi, psikologi, pemasaran, sejarah, retorika, dan bidang lainnya. Sifatnya yang multidisiplin menjelaskan sulitnya menemukan definisi yang jelas. Namun disepakati bahwa komunikasi politik menitikberatkan pada interaksi antara aktor politik, media, dan warga negara, yang dicirikan oleh sifatnya yang persuasif dan strategis.

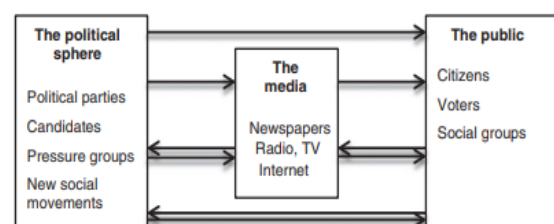
Pertanyaan yang diajukan oleh Lasswell (1927) tentang efek propaganda di Amerika Serikat "*who says what to whom through which channel with what effect?*" dibagikan oleh banyak penelitian di bidang komunikasi politik. Pertanyaan sederhana ini memaksakan dan menyoroti garis dasar analisis untuk proses komunikasi pada umumnya dan komunikasi politik pada khususnya.

Berbicara tentang siapa berarti menganalisis komunikator, siapa yang memiliki informasi. Analisis isi pesan memungkinkan untuk menemukan jawaban atas apa, dan analisis media, yang mungkin melibatkan media langsung, menggunakan iklan politik (misalnya, poster atau selebaran), atau media tidak langsung (misalnya, editorial atau opini di surat kabar atau di TV), mengungkapkan saluran yang digunakan dalam proses komunikasi. Analisis efek, bidang yang telah dieksplorasi secara ekstensif, khususnya dalam literatur Amerika Utara tentang kampanye politik, memungkinkan untuk mempelajari dampak proses komunikasi

pada khalayak (siapa) dan biasanya berfokus pada perilaku memilih (menggunakan jajak pendapat, misalnya).

Model komunikasi Lasswell mengasumsikan bahwa komunikator selalu bermaksud mempengaruhi penerima, bahwa semua pesan memiliki efek, dan bahwa prosesnya satu sisi ke arah bawah. Sejak lama dalam sejarah, komunikasi politik sebenarnya hanya dilihat sebagai proses linier penyampaian informasi dari aktor politik, seperti partai atau kandidat kepada warga, yang bisa langsung tetapi juga dimediasi oleh media. Seperti pada Gambar 2, terlihat arah komunikasi ditangkap oleh media dan kemudian disalurkan kembali yang sekarang dikenal dengan proses mediasi (Gisela Gonçalves, 2020).

Namun, dari sudut pandang tradisional ini, tidak ada komunikasi yang terjadi ke atas, dari kelompok sosial ke ranah politik. Berkat demokratisasi sebagian besar sistem politik, sifat komunikasi politik telah berubah. Komunikasi politik bergeser ke ranah publik ketika masyarakat, sebagian besar sebagai akibat dari meningkatnya akses informasi, terlibat dalam aktivitas politik. Tindakan pemungutan suara yang sederhana tidak lagi cukup dan pemilih telah menjadi warga negara yang aktif yang mampu berorganisasi dan terlibat dalam politik penyebab, sehingga mengembangkan komunikasi horizontal antara aktor politik dan warga negara dan menimbulkan aksi dan protes yang semakin diliput oleh media.



Gambar 2. Proses Komunikasi Politik

Sumber: Gisela Gonçalves, 2020

Perebutan ruang media, baik oleh agen politik elektif secara resmi, seperti

partai politik atau kandidat atau oleh organisasi nonresmi, seperti gerakan sosial baru atau bahkan kelompok teroris, menuntut model dan teori yang semakin kompleks untuk memahami komunikasi politik kontemporer (Lilleker, 2006). Saat ini, seperti terlihat pada Gambar 2, proses komunikasi juga mengarah ke atas dari opini publik ke ranah politik. Bidang komunikasi politik, oleh karena itu, berkaitan dengan konstruksi dan penyebaran pesan yang berpotensi memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada politik.

Secara klasik, partai politik merupakan organisasi politik terpenting dalam komunikasi politik dan proses pembuatan kebijakan. Tapi mereka bukan hanya organisasi yang signifikan dalam konteks komunikasi politik. Komunikator pesan mungkin organisasi lain, seperti *think tank*, organisasi nonpemerintah seperti gereja, serikat pekerja, organisasi lingkungan, organisasi hak asasi manusia, atau kelompok kepentingan lainnya. Wartawan juga merupakan agen yang sangat penting dalam proses komunikasi politik, begitu pula gerakan sosial

Kepemimpinan Transformasional

Konsepsi kepemimpinan transformasional pertama kali dikemukakan oleh James McGregor Burns yang menerapkannya dalam konteks politik dan selanjutnya ke dalam konteks organisasional oleh Bernard Bass. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan transformasional, Bernard Bass (Stone, 2004) mengatakan: "Pemimpin transformasional mengubah nilai-nilai pribadi pengikut untuk mendukung visi dan tujuan organisasi dengan menciptakan lingkungan di mana hubungan dapat dibentuk dan dengan membentuk iklim kepercayaan di mana visi dapat dibagi". Selanjutnya, secara operasional Bernard Bass (Gill, 2010) memaknai kepemimpinan transformasional sebagai: *Leadership and performance beyond expectations* (Ruliana, 2016).

Hasil penelitian Bass, Avolio, dan Atwater (1996) menemukan bahwa laki-

laki umumnya lebih menampilkan kepemimpinan transaksional jika dibandingkan dengan perempuan. Sebaliknya, perempuan lebih memperlihatkan kepemimpinan transformasional jika dibandingkan dengan laki-laki. Banyak kualitas yang diperlukan untuk memiliki kepemimpinan organisasi yang efektif pada situasi sekarang ini, yakni berkualitas dan umumnya diasosiasikan dengan kepemimpinan transformasional yang dikaitkan dengan para pemimpin perempuan.

Kepemimpinan transformasional yang diidentifikasi oleh Bass dan Avolio (1989) dalam Iqbal (2016) adalah: (1) Pengaruh Ideal (*Idealized Influence*) di mana pemimpin transformasional memberikan visi, menginspirasi pengikut, dan mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dalam timbal balik; (2) Motivasi Inspiratif (*Inspirational motivation*), dimensi ini mengeksplorasi kemampuan pemimpin untuk merangsang kepercayaan pengikut ke dalam visi dan nilai-nilainya; (3) Pertimbangan intelektual (*Intellectual consideration*). Pemimpin transformasional bertindak sebagai pelatih dan mentor. Mereka terus memberikan umpan balik kepada karyawan untuk pengembangan mereka selain komunikasi profesional yang berkaitan dengan pengembangan organisasi; (4) Stimulasi intelektual (*Intellectual stimulation*;) pemimpin transformasional mendorong bawahan mereka untuk menilai cara kebiasaan mereka dalam melakukan sesuatu dan memberikan ide-ide kritis untuk memecahkan masalah di lingkungan mereka

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, bermaksud mengungkapkan sedetail mungkin objek yang diteliti dan aspek-aspek lain yang tidak mungkin dihitung dengan matematika. Fenomenologi tertarik untuk mengidentifikasi masalah ini dari dunia pengalaman indrawi ke dunia yang penuh

dengan objek yang bermakna. Satu hal yang semula terjadi dalam kesadaran individu yang terpisah tetapi dalam interaksi menjadi kesadaran kolektif.

Schutz menganggap manusia sebagai makhluk sosial, sehingga kesadaran akan kehidupan sehari-hari merupakan kesadaran sosial yang menurutnya berlangsung dalam dua cara: *Pertama*, kesadaran untuk mengandalkan kegiatan orang lain untuk dibagikan. *Kedua*, kesadaran menggunakan tipe yang diciptakan dan dikomunikasikan oleh kelompok individu yang ada. Subjek dalam penelitian ini adalah perempuan anggota DPR RI. Penelitiannya dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, dan wawancara mendalam terhadap sembilan anggota DPR RI yang dijadikan informan yang secara langsung berinteraksi dengan Puan Maharani, dan bisa memberikan informasi mengenai komunikasi politik kepemimpinan transformasional Puan Maharani dalam aktivitasnya memimpin DPR RI. Langkah selanjutnya melakukan studi kepustakaan dokumentasi, dan penelusuran melalui internet.

Ciri-ciri informan adalah perempuan dengan dua periode legislasi di DPR-RI. Wawancara dilakukan melalui media telepon, *WhatsApp*, dan *Zoom*. Hal ini dilakukan karena di masa pandemic Covid-19 tidak mungkin dilakukan secara tatap muka. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berkaitan dengan komunikasi politik kepemimpinan transformasional dalam parlemen divalidasi dengan dokumen berupa opini yang sering ditampilkan oleh legislator perempuan di berbagai media massa.

Pengamatan dilakukan pada setiap kegiatan legislatif di partai, rapat paripurna, dan rapat fraksi. Model interaktif Huberman dan Meal melalui tahap reduksi data, display, dan verifikasi (Sugiyono, 2012) digunakan dalam studi ini.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dalam penelitian ini, peneliti menemukan tahapan komunikasi politik kepemimpinan transformasional yang dilakukan Puan Maharani setelah terpilih sebagai Ketua DPR RI.

Model Harold D Laswell sebagai strategi komunikasi yaitu *who says what in which channel to whom with what effect*, dimana masing-masing elemen komunikasi ini dapat dianalisis dan memiliki pengaruh yang kuat. Namun seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, proses komunikasi ini berubah menjadi interaktif (Gisela Gonçalves, 2020). Peneliti juga mengkaitkan dengan kepemimpinan transformasional dari Bass dan Avolia.

Untuk melihat dan mengetahui bagaimana representasi karir politik Puan Maharani sebagai seorang komunikator yang memiliki kompetensi dalam bidang politik, tentunya penting untuk menjelaskan bagaimana pengalaman dalam dunia perpolitikan yang dialami oleh Puan Maharani. Masyarakat mengenal Puan sebagai putri Presiden Indonesia kelima Megawati Sukarnoputri dan Taufik Kiemas, serta cucu Presiden Soekarno.

Puan memulai pengalaman organisasinya saat masih muda dengan menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tahun 2006. Kemudian menjadi pengurus PDI Perjuangan. Di internal partai tersebut, perempuan lulusan Jurusan Komunikasi Massa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia ini menjadi pengurus DPP PDIP bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, periode 2010-2015.

Puan Pertama kali mengikuti pemilu tahun 2009. Ia mencalonan diri sebagai anggota legislatif mewakili PDIP di daerah pemilihan V Jawa Tengah yang meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali. Puan terpilih dengan meraih 242.504 suara dan ditempatkan di Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, pangan, maritim dan kehutanan.

Pada pemilu 2014, Puan kembali maju sebagai caleg di dapil yang sama. Ia kembali menang dengan memperoleh 369.927 suara. Puan ditempatkan di Komisi VI DPR, membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha. Ia kemudian ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di kabinet kerja Presiden Joko Widodo, Periode 2014- 2019.

Puan menjadi satu-satunya menko yang tidak terkena reshuffle atau pergantian kabinet kerja jelang satu tahun masa pemerintahan Jokowi pada Agustus 2015. Oleh beberapa pihak, hal itu dinilai tak lepas dari keberhasilan Puan mengantarkan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemenang dalam Pemilu 2014. Terakhir, Puan mundur dari Kabinet Kerja Jokowi karena meraih kursi Ketua DPR RI mewakili PDIP untuk masa jabatan 2019-2024, dengan perolehan suara terbanyak, yakni 404.034 suara.

Dalam memimpin parlemen, Puan bertindak sebagai komunikator yang memiliki kewenangan untuk membangun ruang komunikasi baik secara internal dan eksternal. Secara internal menetapkan aliran informasi bagi para anggota legislatif di bawah kepemimpinannya. Secara eksternal, membina hubungan dengan para konstituen dan menerima masukan mengenai kebijakan yang diambil dari masyarakat dan aspirasi ke DPR RI.

Menurut informan AS (wawancara 20 November, 2021) hal tersebut didasarkan pada visi dan misi dan tujuan parlemen untuk menciptakan lingkungan, di mana hubungan dapat dibentuk, dan membentuk iklim kepercayaan. Ini mencirikan kepemimpinan transformasional, seperti dikemukakan oleh Bass: pemimpin transformasional mengubah nilai-nilai pribadi pengikut untuk mendukung visi dan tujuan organisasi dengan menciptakan lingkungan di mana hubungan dapat dibentuk dengan membentuk iklim kepercayaan di mana visi dapat dibagi kepada para anggota DPR RI.

Di bawah kepemimpinan Puan Maharani, para perempuan anggota

legislative telah mengalami banyak perubahan pada cara pandang, sikap, dalam mengemukakan berbagai opini. Menurut AF (Wawancara Tanggal 20 November, 2021) Ini membuktikan bahwa “Puan memiliki pengaruh yang ideal dan motivasi inspirasi dimana pemimpin transformasional memberikan visi, menginspirasi pengikut, dan mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat secara timbal balik. Terbukti bahwa Puan Maharani membentuk Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPRI) beranggotakan seluruh perempuan anggota DPR RI merupakan forum anggota parlemen perempuan lintas partai yang memperjuangkan isu-isu perempuan dan kelompok marginal lainnya di DPR.”

Sebagai pemimpin parlemen, Puan Maharani sebagai *intellectual consideration* bertindak sebagai pelatih dan mentor. Puan terus memberikan umpan balik kepada para anggotanya untuk pengembangan mereka selain komunikasi profesional yang berkaitan dengan pengembangan organisasi dan memberikan *intellectual stimulation*: yaitu mendorong para anggota untuk menilai cara kebiasaan mereka dalam melakukan sesuatu dan memberikan ide-ide kritis untuk memecahkan masalah di lingkungan komunikasi politik, baik secara internal maupun secara eksternal.

Dengan demikian dapat dikatakan secara kinerja politik dalam parlemen, perempuan anggota DPR-RI menunjukkan keaktifan yang baik. Yaitu bertanya maupun berkomentar yang memiliki bobot dan konteks sesuai pembahasan sidang. Sebagai pemimpin perempuan, Puan Maharani menampilkan sikap dan kepribadian sebagai pemimpin yang pekerja keras, dan bertanggung jawab.

Informan SN (wawancara, 24 November, 2022) menyatakan “dalam penilaiannya Puan Maharani sebagai pemimpin perempuan di DPRRI sudah berperan dengan baik”. Gaya komunikasi yang lugas dan efektif adalah modal utama Puan Maharani dalam meyakinkan

konstituen. Pasti ada sikap skeptis yang muncul bahwa keberhasilan Puan berkat nama besar kakek dan ibunya, tetapi secara personal Puan memiliki kompetensi dalam mengelola keanggotaan.

Pesan Politik

Puan Maharani menuju pimpinan DPR RI bukanlah tanpa konsepsi politik yang jelas. Konsepsi politik yang utama dari seorang Puan adalah menjadikan parlemen sebagai representasi dan rumah rakyat yang sesungguhnya sebagaimana dalam pidato pelantikannya sebagai Ketua DPR RI yang akan dijalankan, yaitu mengemukakan tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI dengan mengamalkan Pancasila; membahas pentingnya menjaga keutuhan NKRI dengan mengamalkan Pancasila; melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang yang tertunda di periode sebelumnya sebagai prioritas, dan mengharapkan dukungan dari masyarakat, termasuk para pengamat dan kalangan media massa.

Dengan konsepsi tersebut, maka yang utama harus dilakukan ialah membangun kesadaran narasi yang bisa diterima rakyat banyak. Narasi yang memberi pesan politik membumi dalam dimensi nilai dan dimensi simbol. Tanpa konsepsi, seorang Wakil Rakyat akan sulit menggerakkan kesadaran rakyat dalam mewujudkan perjuangannya. Puan menyadari bahwa narasi dan penawaran politik sebagai sebuah konsepsi, haruslah juga menjadi sebuah edukasi yang terbangun di ruang ruang publik. Karena politisi tanpa konsepsi adalah politisi hampa tanpa arah juang yang jelas.

Media Komunikasi

Puan Maharani sadar, bahwa kesadaran publik khususnya kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam momentum politik adalah sebuah keniscayaan. Maka media komunikasi politik dimanfaatkan untuk dijadikan alat dalam mendiskusikan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan.

Menurut informan AS dan SR (wawancara 20 November 2021) “bentuk komunikasi yang digunakan adalah komunikasi interpersonal, dan komunikasi kelompok secara interaksional. Dan menggunakan media massa, seperti media cetak, media elektronik, media online maupun media sosial, *Instagram*, *Facebook*, dan *Twitter*”. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui semua aktivitas Puan Maharani dalam memimpin parlemen.

Semua informasi politik yang berkaitan dengan Puan Maharani akan menjadi berita di media manapun, terlepas dari opini publik yang sifatnya pro dan kontra. Disini terbukti bahwa komunikasi politik Puan Maharani dalam menerapkan kepemimpinan transformasional adalah modal utamanya sebagai politisi yang punya kapasitas dan kemampuan mengantarnya menjadi Ketua DPR RI. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Bass dan Avolio bahwa perempuan lebih memperlihatkan kepemimpinan transformasional jika dibandingkan dengan laki-laki. Banyak kualitas yang diperlukan untuk memiliki kepemimpinan organisasi yang efektif pada situasi sekarang ini, yakni berkualitas dan umumnya diasosiasikan dengan kepemimpinan transformasional yang dikaitkan dengan para pemimpin perempuan.

Efek komunikasi Politik

Pengaruh atau efek, menurut (Rogers, 1974) adalah perbedaan yang terjadi pada apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan penerima sebelum dan sesudah pesan diterima. Output yang diharapkan dari komunikasi politik adalah khalayak atau konstituen dapat memahami pesan dari sumber untuk menerima dan memilih calon kepala daerah perempuan tersebut (Alie, 2010; Zamroni, 2016).

Efek komunikasi politik yang disampaikan oleh komunikator politik memperjuangkan kepentingan publik yang berbeda melalui pesan verbal dan nonverbal. Selain itu, disampaikan pula,

mereka saling mempengaruhi dengan kebijakan pemerintah yang berbeda (Santi, 2018; Siagian, 2013). Efek komunikasi politik terkadang tidak dapat diprediksi karena kepentingan bersama dari kelompok masyarakat yang berbeda sulit untuk dirumuskan dan dipetakan dalam pesan politik yang disampaikan (Mukarom, 2011; Sarinastiti & Fatimah, 2019; Zamroni, 2016).

Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Puan Maharani adalah merencanakan dan melaksanakan program-program yang telah dijanjikan pada kampanye politik sebelumnya. Puan Maharani selaku ketua DPR RI dalam melaksanakan komunikasi baik secara internal, adalah melalui komunikasi langsung, dalam bentuk rapat. Komunikasi eksternal dengan melakukan pemeriksaan lapangan langsung (*bhlusconi*). Pertemuan-pertemuan tersebut bersifat dialogis, menampung keluhan dan pendapat masyarakat mengenai permasalahan hidup mereka untuk disampaikan kepada pimpinan.

Implementasi strategi merupakan proses manajerial dalam mengembangkan konsep yang telah dibuat. Menurut Nurussa'adah (2018), untuk melaksanakan strategi politik, faktor manusia sangat penting, terutama dalam tiga aspek yang berbeda, yaitu: pemimpin politik, pemimpin partai politik yang bekerja penuh waktu, anggota partai politik yang bekerja penuh waktu, dan anggota partai politik yang paruh waktu. Hubungan antara pihak-pihak tersebut adalah dalam pendidikan, motivasi, dan etika. Ketiganya merupakan syarat dasar keberhasilan implementasi strategi. Di bidang operasional, persyaratan penting untuk sukses tergantung pada prinsip kecepatan, penyesuaian, dan komunikasi persuasif.

Jadi dapat dikatakan, Puan Maharani bukanlah seorang amatiran, dia adalah contoh figur politisi perempuan yang sukses dalam setiap momentum politik. Gemblengan politik telah membentuk jati diri dan karakter seorang leadership. Berkat

komunikasi politik yang handal, Puan mampu membangun jaringan konstituen agar memilihnya sebagai Wakil Rakyat dalam Pemilu 2019, sehingga bisa meraih 404.034 suara dan menjadi Caleg dengan raihan suara terbanyak untuk pemilihan kursi DPR RI se Indonesia.

Kesimpulan

Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI adalah perempuan pertama di Indonesia yang menduduki posisi Ketua DPR RI, dan salah satu pemimpin parlemen perempuan dunia versi IPU Parlene. Puan Maharani adalah perempuan pertama yang terpilih sebagai Ketua DPR-RI, sebagai komunikator politik yang dipengaruhi oleh perjalanan panjang dan pengalaman berorganisasi dalam bidang politik sebelumnya.

Pesan politik yang disampaikan adalah membuka ruang komunikasi ke berbagai kalangan di masyarakat untuk memberikan masukan atau kritik pada kinerja kepemimpinan dalam parlemen. Penerapan model komunikasi politik dari Harold D Lasswell dan kepemimpinan transformasional dari Bass Avolio dapat membagi kinerja dalam parlemen.

Puan Maharani membentuk Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPRI) beranggotakan seluruh perempuan anggota DPR RI sebagai forum anggota parlemen perempuan lintas partai yang memperjuangkan isu-isu perempuan dan kelompok marginal lainnya di DPR.

Daftar Pustaka

- Alie, M. (2010). *Pemasaran Politik dan Politik Kepartaian di Indonesia: Kajian Pemilihan Umum Tahun 2009 di Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. Universiti Utara Malaysia.
- Bracciale, R., & Martella, A. (2017). Define the populist political communication style: the case of Italian political leaders on Twitter. *Information Communication and Society*, 20(9), 1310–1329. <https://doi.org/10.1080/1369118X.20>

- 17.1328522
Grebelsky-lichtman, T. (2021). Female politicians : a mixed political communication model Female politicians : a mixed political communication model. *The Journal of International Communication*, 0(0), 1–26. <https://doi.org/10.1080/13216597.2017.1371625>
- Gunadha, R. (2019). *Ketua Baru DPR RI, Puan Maharani Jadi Trending Topic di Twitter*. SuaraCom. <https://www.suara.com/news/2019/10/01/220938/ketua-baru-dpr-ri-puan-maharani-jadi-trending-topic-di-twitter?page=all>
- IPU Parlene. (2021). *Compare data Parline: the IPU's Open Data Platform*. IPU Parlene. https://data.ipu.org/compare?field=chamber%3Afield_chamber_speakers%3Afield_sex&structure=any_lower_chamber#pie
- Iqbal, Q. (2016). Organizational Politics, Transformational Leadership and Neglect in Banking Sector Sustainable Development in SMEs View project. *International Journal of Management, Accounting and Economics*, 3(October 2016). www.ijmae.comP
- Jalalzai, F. (2004). Women political leaders: Past and present. *Women and Politics*, 26(3–4), 85–108. https://doi.org/10.1300/J014v26n03_04
- Kruikemeier, S., van Noort, G., Vliegenthart, R., & de Vreese, C. H. (2013). Getting closer: The effects of personalized and interactive online political communication. *European Journal of Communication*, 28(1), 53–66. <https://doi.org/10.1177/0267323112464837>
- Maela, N. F. S., Elita, F. M., Rijal, E., & Mulyana, S. (2018). Political Communication Competence of Women Legislators. *Prosiding Atlantis Press*, 165(Iccsr), 423–425. <https://doi.org/10.2991/iccscr-18.2018.93>
- McNair, B. (2017). *An introduction to political communication*. Taylor & Francis.
- Mukarom, Z. (2011). Strategi Komunikasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 5(18), 599–624.
- Moffitt, B., & Tormey, S. (2014). Rethinking populism: Politics, mediatization and political style. *Political Studies*, 62(2), 381–397. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.12032>
- Norris, P., & Lovenduski, J. (1989). Women Candidates for Parliament: Transforming The Agenda? *British Journal of Political Science*, 19(1), 106–115. <https://doi.org/10.1017/S0007123400005342>
- Pilet, J. B., & Cross, W. (2014). The selection of political party leaders in contemporary parliamentary democracies: A comparative study. *The Selection of Political Party Leaders in Contemporary Parliamentary Democracies: A Comparative Study*, 1–267. <https://doi.org/10.4324/9781315856025>
- Ruliana Poppy. (2016). *Komunikasi Organisasi, Teori dan Studi Kasus, Edisi Kedua*. RajaGrafindo Persada. <http://www.rajagrafindo.co.id/produk/komunikasi-organisasi/>
- Santi, F. (2018). Pesan Nonverbal dalam Komunikasi Politik Wahidin Halim Sebagai Calon Gubernur Banten pada Pilkada Banten 2017. *Nyimak: Journal of Communication*, 2(2), 131–149
- Sarinastiti, N., & Fatimah, P. S. (2019). Edukasi komunikasi politik dalam menciptakan kesadaran dan minat pemilih perempuan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1), 44–58

- Siagian, H. F. (2013). Partisipasi Dan Efek Komunikasi Pemuka Pendapat Dalam Pembangunan. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 14(1), 53-73.
- Sianipar, T. M. E., & Hanita, M. (2019). Analisis Gaya kepemimpinan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Perspektif Ketahanan Politik di Daerah (Studi Kasus: Kepemimpinan Rospita Sitorus sebagai Wakil Ketua DPRD Simalungun, *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan* 2(2), 137-144. <http://jurnalpkn.ui.ac.id/index.php/jkskn/article/view/26>
- Toplišek, A. (2015). Book Review: Political Theory: Arts of the Political: New Openings for the Left. In *Political Studies Review* (Vol. 13, Issue 1). <https://doi.org/10.1111/1478-9302.12073>
- Zamroni, M. (2013). Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik Dan Gender. *Dakwah*, XIV(1), 103–132. <http://202.0.92.5/dakwah/jurnaldakwah/article/view/277/257>